

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kabupaten Maluku Barat Daya)

Fredrik Laitera^{1*}, N. Ahuluheluw¹, M. Fadila Laitupa²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

Email : eddylaitera@gmail.com

ABSTRACT

The research was conducted under the title analysis of factors that affect the quality of local government financial reports (study on OPD Southwest Maluku Regency). This study aims to test empirically the effect of the regional financial accounting system, human resource competence, internal control systems and the use of information technology on the quality of local government financial reports. The population in this study were all ASN working in the Regional Apparatus Organization of Southwest Maluku Regency, while the sample used as the test analysis unit was as many as 65 ASN. The data collection technique used a questionnaire while the data analysis method used the Multiple Regression analysis technique. Based on the results of the analysis, the results show that the regional financial accounting system, human resource competence,

KEYWORDS : Regional Financial Accounting System, Human Resource Competence

INTISARI

Penelitian yang dilakukan dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada OPD Kabupaten Maluku Barat Daya). Penelitian bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh ASN yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, sedangkan sampel yang dijadikan sebagai unit analisis pengujian adalah sebanyak 65 ASN. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sedangkan metode analisis data menggunakan teknik analisis Regresi Berganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KEYWORDS: *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia.*

Pendahuluan

Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja manajemen keuangan suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya (Prasetya, 2005). Laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi karakteristik kuantitatif yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami (PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan menurut PP 71 Tahun 2010 meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Nurillah, 2014). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberian opini sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.

Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Nurillah, 2014). Terdapat lima opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), Pernyataan Menolak Memberikan Opini Atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Sumber : <http://www.bpk.go.id>.

Fakta yang terjadi lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, atas 542 LKPD Tahun 2018, BPK menemukan 5.858 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern. Selain kelemahan SPI, BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 6.259 kasus dengan total Rp. 2,19 triliun, (Sumber : <http://www.bpk.go.id> - IHPS I Tahun 2019 : 112).

Tabel 1.1
Opini BPK atas LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya

Tahun Opini				
2014	2015	2016	2017	2018
WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

(sumber : www.bpk.go.id □ IHPS I 2019 : 305)

Dari tabel diatas terlihat bahwa tidak ada peningkatan opini yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa terdapat akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung oleh bukti yang cukup yaitu, permasalahan penyajian asset lainnya berupa sisa kas yang belum disetor, belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SKTJM dan jaminan yang memadai, serta belum dipertanggungjawabkan dan ditetapkan pembebanannya oleh Tim Penyelesaian Kekurangan Daerah (TPKD). BPK juga menemukan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan 40 unit paket pekerjaan yang belum di pungut/diterima oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp. 10,37 miliar. (Sumber : <http://www.bpk.go.id> - IHPS I Tahun 2019 : 125).

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji sejauh mana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Alasan peneliti mengambil objek penelitian di Kabupaten Maluku Barat Daya karena Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu daerah yang mendapat opini WDP sebanyak lima kali dalam beberapa tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai 2018 yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sehingga penelitian ini diberi judul **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya)**.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (2) untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (3) untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (4) untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat sipil negara (ASN) yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Adapun kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pimpinan OPD, kepala sub bagian keuangan/tatausaha keuangan bendahara pengeluaran pada masing-masing OPD Di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan jumlah OPD 30 yang terdiri dari : 18 Dinas, 8 Badan, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat dan 1 Kantor Sat Pol PP.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Penggunaan SPSS untuk menguji validitas, reliabilitas, normalitas, dan uji regresi untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara signifikan. Jika probabilitas sig. < 0,05 maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Imam Ghozali, 2011).

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai signifikansi $0.003 < 0.05$ sehingga hipotesis (H_1) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permadi (2013) menyatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, hal itu dikarenakan dengan adanya sistem akuntansi keuangan maka akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang sudah diterapkan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan pun akan memiliki kualitas yang baik. Desianawati (2014) hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan SAKD oleh pemerintah telah menunjukkan sinyal yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat terus mendukung kinerja pemerintah, sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menerapkan SAKD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia (KSDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi $0.004 < 0.05$ sehingga hipotesis (H_2) diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Fitri Septarini dan Frans Papilaya (2016) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan kompetensi ASN selaku pengelola keuangan daerah saat ini diperlukan peran pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk lebih meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan pelatihan dan memiliki integritas, kesetiaan dan ketaatan dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan sehingga semakin tinggi kompetensi yang dimiliki pengelola keuangan, mampu menyusun laporan keuangan daerah dengan tetap waktu dan memiliki informasi yang keuangan yang berkualitas.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai nilai t_{hitung} sebesar -2.042 dan koefisien regresi -338 dengan signifikansi $0.046 < 0.05$ sehingga hipotesis (H_3) diterima. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Novtania Mokoginta dkk (2017) yang meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem Akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dari hasil penelitian tersebut menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Reni Yendrawati (2013) bahwa, sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern diorganisasi dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh ASN serta dijalankan secara konsisten dan terus menerus dalam tugas dan tanggungjawab, sehingga mampu menekan dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dan juga melindungi asset/ sumber daya organisasi. berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang ditetapkan sudah baik, tetapi belum dijalankan secara konsisten oleh pimpinan sehingga menyebabkan kurangnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (PTI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga hipotesis (H_4) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Devie Amelia Cahyandari (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal ini didukung oleh penelitian Yosefrinaldi (2013) dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka diperoleh beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain: hasil pengujian statistik untuk hipotesis pertama, menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian statistik untuk hipotesis kedua, menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Hasil pengujian statistik untuk hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern sudah baik, tetapi belum diterapkan dan dijalankan secara efektif dan konsisten sehingga menyebabkan kurangnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil pengujian statistik untuk hipotesis keempat, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. semakin baik pemanfaatan teknologi informasi di suatu daerah (*agent*) maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan yang akan disampaikan kepada pemberi amanah (*principal*).

Daftar Pustaka

- Abdul Halim (2002). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1)..
- Devie Amelia Cahyandari (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Sukoharjo). Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Gede Edy Prasetya. 2005. Penyusunan dan Analilis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Andi. Yogyakarta.
- Ikgang Murapi. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lombok Tengah). Jurnal Infestasi Vol.12, N0. 12. Universitas Mataram.
- Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2019. Jakarta: Badan Pemeriksaaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)- <http://www.bpk.go.id>.
- Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan program SPSS, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lilis Wijayanti. 2017 Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi,Sosial, dan Politik. UPP STIM YKPN.
- Novtania Mokoginta, dkk. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Akuntansi *Going Concren* 12 (2). Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Nugroho Widjajanto. 2001. Sisttem Informasi Akuntansi. Erlangga. Jakarta
- Reni Yendrawati, 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating. *JAAI VOLUME 17 NO. 2, DESEMBER 2013: 166-175*. Universitas Islam Yogyakarta.
- Spencer, M. Lyle and Spencer, M. Signe (1993), *Competence at Work Modelas for Superrior Performance*, John Wily & Son, Inc, New York, USA.
- Yosefrinaldi.2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel